

Vladimir Vladimirovich Putin: Mantan Agen KGB Yang Menjadi Presiden Rusia

**Oleh: Yappi Manafe
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 1982**

Pengantar/Biografi

Vladimir Putin lahir dari keluarga biasa pada 7 Oktober 1952 di Leningrad dan hampir sepanjang hidupnya, Ia tetap mempertahankan hubungan dengan kehidupan seperti itu. Ibu Vladimir Putin, Maria Shelomova, adalah seorang yang sangat baik dan penuh kasih, tidak menyetujui keputusan Putin untuk berlatih judo. “Setiap kali saya pergi berlatih, Ibu menggerutu, “dia pergi berkelahi lagi”. Keadaan berubah setelah pelatih Vladimir Putin datang ke rumahnya dan menceritakan kepada orang tuanya tentang apa yang dilakukan dan dicapai oleh Putin selama berlatih, dan sikap keluarganya terhadap olahraga tersebut kemudian berubah. Ayahnya lahir di St. Petersburg pada tahun 1911, ikut serta dalam perang. Pada tahun 1950-an, ayahnya bekerja sebagai penjaga keamanan dan kemudian sebagai mandor di pabrik pembuatan gerbong kereta. Ketika Perang Dunia I pecah, kehidupan di St. Petersburg menjadi sulit, orang-orang kelaparan, sehingga seluruh keluarga pindah ke Pominovo, sebuah desa di Wilayah Tver. Di Pominovo-lah ayah saya bertemu dengan ibu saya, dan mereka menikah pada usia 17 tahun.” Setelah perang berakhir, keluarga Putin pindah ke sebuah kamar di apartemen komunal (kommunalka), sebuah bangunan tempat tinggal khas St. Petersburg di Baskov Lane. Vladimir Putin mengenang:

“Bangunan itu memiliki halaman yang seperti sumur. Lantai lima. Tidak ada lift. Sebelum Perang Dunia, orang tua saya menempati separuh rumah di Peterhof dan mereka sangat bangga dengan standar kehidupan yang telah mereka capai saat itu, tampak seperti impian tertinggi.”

Pada 1960–1968, Vladimir Putin bersekolah di Sekolah Dasar No. 193 di Leningrad. Setelah kelas delapan, ia masuk Sekolah Menengah No. 281, sebuah sekolah khusus yang berfokus pada kimia di bawah naungan sebuah Institut Teknologi, dan menyelesaikan pendidikannya di sana pada tahun 1970. Putin mengatakan:

“Menjadi jelas bahwa kecakapan hidup di jalanan saja tidak cukup, sehingga saya mulai berolahraga, tetapi itu pun tidak cukup untuk mempertahankan status saya. Saya menyadari bahwa saya juga harus belajar dengan baik.”

Pada tahun 1970, Vladimir Putin menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Leningrad, dan memperoleh gelarnya pada tahun 1975.

Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Putin belajar di Sekolah KGB[#] No. 1 di Moskow, bahkan sebelum menyelesaikan sekolah, Vladimir Putin sudah ingin bekerja di bidang intelijen. Ia mendatangi kantor penerimaan umum Direktorat KGB untuk mencari tahu bagaimana caranya menjadi seorang perwira intelijen. Di sana, ia diberitahu bahwa terlebih dahulu harus menjalani dinas militer atau menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi, dan sebaiknya memperoleh gelar di bidang hukum. Setelah lulus dari Universitas Negeri Leningrad, Putin ditugaskan untuk bekerja di badan-badan keamanan negara. Ia pertama kali ditempatkan di sekretariat Direktorat, kemudian dipindahkan ke divisi kontrainTELijen, tempat ia bekerja selama sekitar lima bulan. Setengah tahun kemudian, ia dikirim mengikuti kursus pelatihan ulang bagi personel operasional. Kemudian Putin belajar di Institut Spanduk Merah Andropov (Andropov Red Banner Institute), tempat ia mendapatkan pelatihan untuk penugasannya ke Jerman. Vladimir Putin berangkat ke Jerman Timur pada tahun 1985 dan bekerja di kantor intelijen setempat di Dresden hingga tahun 1990. Selama masa tugasnya, Ia dipromosikan menjadi letnan kolonel dan menduduki posisi asisten senior kepala Departemen. Pada tahun 1989, ia dianugerahi medali perunggu yang diterbitkan oleh Republik Demokratik Jerman, yaitu penghargaan “For Faithful Service to the National People’s Army” (Atas Pengabdian Setia kepada Tentara Rakyat Nasional). Setelah kembali dari Jerman ke Leningrad pada tahun 1990, Vladimir Putin menjadi asisten Rektor Universitas Negeri Leningrad yang bertanggung jawab atas hubungan internasional. Pada 1996, ia dan keluarganya pindah ke Moskow, tempat karier politiknya mulai berkembang.

Agustus 1999, Putin diangkat menjadi Perdana Menteri Pemerintah Rusia. Jabatan tersebut ditawarkan kepadanya oleh Presiden Rusia saat itu, Boris Yeltsin. Tidak lama sebelum Tahun Baru 2000, Presiden Rusia, Boris Yeltsin mengusulkan agar Vladimir Putin menjadi Pelaksana Tugas Presiden. Putin mengengang:

“Dua atau tiga minggu sebelum Tahun Baru, Yeltsin memanggil saya ke kantornya dan mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Ini berarti saya harus menjadi Pelaksana Tugas Presiden”.

Putin menggambarkan keputusan tersebut bukanlah keputusan yang mudah, mengingat jabatan itu merupakan “beban yang cukup berat untuk dipikul.” Ia menjelaskan pilihannya:

“Saya memiliki pemikiran dan pertimbangan saya sendiri, tetapi pada saat yang sama ada logika lain yang juga harus saya pertimbangkan. Takdir memberi saya kesempatan untuk bekerja bagi negara pada tingkat yang paling tinggi, dan akan sangat bodoh jika saya mengatakan, tidak, saya akan pergi berjualan biji bunga matahari atau membuka praktik hukum swasta. Semua hal lain itu masih bisa saya lakukan nanti, dan karena itu saya memutuskan bahwa kesempatan ini harus didahulukan, sedangkan yang lainnya dapat dilakukan kemudian.”

Tanggal 31 Desember 1999, Vladimir Putin menjadi Pelaksana Tugas Presiden Federasi Rusia. Vladimir Putin terpilih sebagai Presiden Rusia pada 26 Maret 2000, dan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada 14 Maret 2004. Pada 8 Mei 2008, ia diangkat menjadi Perdana Menteri melalui keputusan presiden. November 2011, Vladimir Putin diajukan sebagai kandidat untuk menjadi Presiden Rusia, para delegasi dalam Kongres Partai Rusia Bersatu (United Russia) ke-12 menyetujui Vladimir Putin sebagai kandidat dalam pemilihan presiden, dan Vladimir Putin terpilih sebagai Presiden Rusia pada 4 Maret 2012.

Pemungutan suara nasional mengenai perubahan Konstitusi Rusia (Amendemen), yang ketentuan-ketentuan utamanya tidak mengalami perubahan sejak 1993, merupakan salah satu peristiwa paling penting di Rusia. Presiden menginisiasi perubahan terhadap Konstitusi tersebut, yang kemudian disetujui oleh mayoritas rakyat Rusia melalui pemungutan suara nasional yang berlangsung pada 25 Juni hingga 1 Juli 2020, dan mulai berlaku pada 4 Juli 2020. Pokok-pokok amendemen terhadap Hukum Dasar Rusia antara lain mencakup supremasi hukum Rusia, pengaturan secara formal mengenai peran Dewan Negara, penguatan peran Duma Negara dan Dewan Federasi, perlindungan terhadap kebenaran sejarah dan masa depan negara, perlindungan terhadap keluarga, keibuan dan kepapakan, serta institusi perkawinan.

Pada pemilihan Presiden 2024, dalam pertemuan dengan para peserta upacara memperingati Hari Pahlawan Tanah Air pada 8 Desember 2023, Vladimir Putin menyatakan dengan jelas bahwa ia akan mencalonkan diri untuk jabatan Presiden Federasi Rusia. Pemilihan presiden diselenggarakan pada 15–17 Maret 2024, dan Vladimir Putin terpilih kembali sebagai Presiden Federasi Rusia. Dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,49 persen, sebanyak 87,28 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya memberikan suara untuk Putin. Tanggal 7 Mei 2024, dalam pidato pelantikannya pada upacara pengambilan sumpah sebagai Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan:

“Dalam dunia yang kompleks dan berubah dengan cepat ini, kita harus berusaha untuk menjadi mandiri dan kompetitif, membuka cakrawala baru bagi Rusia, sebagaimana telah kita lakukan berkali-kali sepanjang sejarah kita. Namun, kita juga harus mengingat pelajaran dari sejarah dan tidak pernah melupakan harga yang sangat mahal yang telah kita bayar akibat konflik dan gejolak internal. Oleh karena itu, negara dan sistem sosial-politik kita harus kuat dan tahan terhadap berbagai ancaman dan tantangan, serta menjamin pembangunan negara kita yang progresif dan stabil, sekaligus menjaga persatuan dan kemerdekaannya.”

Pada hari pelantikannya, Vladimir Putin menandatangani Dekret tentang Tujuan Pembangunan Federasi Rusia hingga 2030 dan untuk Masa Depan hingga 2036. Dekret tersebut menetapkan berbagai indikator dan tugas yang pelaksanaannya akan menjadi ukuran pencapaian tujuan-tujuan tersebut, sekaligus menetapkan batas waktu khusus untuk mencapai target-target tersebut.

Evolusi Sistem Politik Rusia

Rusia muncul kembali sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1991, dan dalam kurun waktu hampir tiga decade, telah terlibat dalam suatu proses besar pembangunan bangsa dan negara (Rusia). Menciptakan demokrasi kapitalis dari nol tentu tidak pernah mudah, tetapi dalam kenyataannya proses tersebut berlangsung dramatis dan penuh kontradiksi. Segalanya harus diciptakan kembali, termasuk sistem partai dan parlemen, hak-hak kepemilikan yang dapat dipertahankan secara hukum, kelas baru para pengusaha, dan yang terutama adalah kerangka konstitusional serta supremasi hukum. Pengesahan konstitusi berlangsung panjang dan memecah-belah, disertai konflik kekerasan antara Parlemen Soviet (terakhir) dan Presiden Boris Yeltsin pada Oktober 1993. Konstitusi yang diadopsi Desember 1993 masih menunjukkan bekas-bekas konflik tersebut. Setelah mengalahkan kekuatan parlemen, Yeltsin memperkenalkan kekuasaan yang diperkuat bagi Presiden sebagai eksekutif, yang tetap berlaku hingga saat ini. Selain itu, Rusia perlu menemukan tempat baru dalam sistem internasional, yang sesuai dengan pandangannya sendiri sebagai kekuatan besar, tetapi juga memperhitungkan kepentingan negara-negara tetangga barunya, yaitu 14 bekas Republik Soviet yang kini telah menjadi negara-negara merdeka.

Pada tahun-tahun sejak runtuhnya komunisme, telah terjadi berbagai pencapaian besar, namun proses tersebut tetap belum selesai dan penuh kontradiksi. Warisan Soviet berupa aparat keamanan yang sangat besar, birokrasi yang luas dan bergantung pada negara, serta sistem kesejahteraan yang terlalu luas tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik, demikian pula faktor-faktor berupa sikap dan budaya politik. Elite politik Rusia yang baru, tetap sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, nilai, dan prasangka dari era Soviet. Hal ini berhadapan dengan generasi muda yang semakin tidak sabar, yang sebagian besar telah tumbuh pada tahun-tahun pasca-Soviet dan bagi mereka komunisme merupakan sesuatu yang hanya dibaca dalam buku-buku sejarah.

Transformasi ekonomi dan politik, telah melahirkan kepentingan dan kekhawatiran baru, yang menuntut sistem politik yang lebih terbuka, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta pertanggungjawaban yang nyata dari pihak berwenang kepada lembaga-lembaga demokrasi perwakilan dan hukum. Sementara Vladimir Putin, yang telah berkuasa sejak tahun 2000, tetap secara legalistik berkomitmen pada ketentuan tertulis konstitusi, komitmennya terhadap semangat konstitusionalisme yang sesungguhnya lebih dipertanyakan. Tuntutan-tuntutan ini meluap ke jalan-jalan pada Desember 2011, dalam aksi protes terhadap kecurangan yang meluas dalam pemilihan umum parlemen. Kelahiran kembali oposisi yang aktif mendorong sejumlah reformasi penting, termasuk pengembalian pemilihan gubernur regional, tetapi kekuasaan rezim segera ditegaskan kembali.

Rusia tetap merupakan apa yang disebut sebagai “demokrasi yang dikelola” (*“managed democracy”*), dengan proses-proses politik yang diawasi dan dikendalikan secara ketat dari Kremlin. Pada Maret 2018, Putin terpilih untuk masa jabatan keempat, dan jika ia tetap menjabat sampai masa jabatan enam tahunnya berakhir pada 2024[@], ia akan menjadi salah satu pemimpin Rusia yang paling lama berkuasa.

Rusia kontemporer tidak dapat dipahami tanpa memahami apa yang terjadi sebelumnya. Kontekstualisasi sejarah sangatlah penting, dan Rusia memiliki sejarah yang cukup panjang selama satu abad terakhir. Dalam kurun waktu tidak lebih dari 100 tahun, Rusia telah mengalami dua perang dunia, empat revolusi besar, perang saudara, dan keruntuhan dua sistem politik besar. Kekaisaran Rusia, yang diperintah oleh dinasti Romanov sejak 1613, terbukti sangat tangguh dalam Perang Besar, yang diikuti Rusia pada Juli 1914 dalam persekutuan dengan Prancis dan Inggris Raya, meskipun Rusia mengalami serangkaian kekalahan. Namun, pada akhirnya, tekanan tersebut terbukti terlalu berat, dan pengunduran diri Nicholas II pada Februari 1917 mengakhiri pemerintahan Romanov setelah 300 tahun berkuasa. Setidaknya sejak 1825, telah berkembang tekanan untuk memperkenalkan pemerintahan yang dapat dimintai pertanggung-jawaban, dan kini konstitusionalisme yang sesungguhnya akhirnya tampak telah tiba. Pada saat yang sama, sosialisme juga telah tiba, dalam bentuk (dewan) buruh, petani, dan tentara. Kekuasaan ganda tidak hanya mewakili dua kelompok lembaga yang saling bersaing, tetapi juga dua ideologi revolusi – yang oleh kaum Marxis disebut sebagai *“demokrasi borjuis”* dan sosialis. Hanya enam bulan setelah jatuhnya pemerintahan otokratis, pada 7 November 1917, partai Bolshevik yang radikal di bawah kepemimpinan Vladimir Il’ich Lenin yang tidak mengenal kompromi berkuasa. Sudah terlambat bagi penguasa baru untuk menghentikan pemilihan umum yang telah direncanakan untuk Majelis Konstituante, dan kaum Bolshevik mendapati diri mereka sebagai minoritas dalam lembaga baru tersebut. Ini merupakan Badan Legislatif pertama dalam sejarah Rusia yang benar-benar dipilih secara demokratis, dengan 370 kursi diberikan kepada Partai Revolusioner Sosialis, dan 175 kursi kepada kaum Bolshevik. Majelis tersebut bersidang selama 13 jam, dari pukul 4 sore hingga pukul 5 pagi, pada 18–19 Januari 1918. Pada pagi hari, ketika penjaga sudah *“lelah”*, Majelis dibubarkan – dan tidak pernah bersidang kembali. Dengan demikian, eksperimen besar pertama Rusia dalam demokrasi berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan. Perang Saudara yang brutal selama tiga tahun berakhir dengan kemenangan Bolshevik, dan panggung telah dipersiapkan bagi salah satu eksperimen terbesar dalam rekayasa politik dan sosial dalam sejarah. Kekuasaan dominan Partai Komunis kini ditegakkan oleh Lenin, dan setelah kemenangan dalam Perang Saudara 1918–20 dipastikan, rezim tersebut mampu mengonsolidasikan kekuasaannya.

Bagi Joseph Stalin, setelah suatu pergulatan menyusul kematian Lenin pada 1924 berhasil memperoleh kekuasaan diktator, industrialisasi yang dipercepat segera menjadi tujuan utama, dan kolektivisasi paksa kaum tani ke dalam pertanian kolektif dan pertanian negara disertai penderitaan dan kelaparan yang tak terbayangkan. Intensifikasi tindakan pemaksaan mencapai puncaknya dalam teror pada tahun 1930-an. Namun, kemenangan atas Jerman Nazi dan sekutunya dalam Perang Patriotik Raya 1941–45 tampaknya membenarkan seluruh pengorbanan pada periode awal Soviet. Harapan akan berakhirnya pemaksaan massal ternyata tidak terpenuhi, dan teror tetap berlangsung secara luas, hingga kematian Stalin pada Maret 1953.

Pengganti Stalin, Nikita Khrushchev, mengizinkan apa yang disebut sebagai “*pencairan*” (“*the thaw*”), termasuk pembebasan jutaan orang dari kamp-kamp kerja paksa.. Dalam “Pidato Rahasia” (“*Secret Speech*”) pada 25 Februari 1956 di Kongres Partai ke-20, Khrushchev memberikan kritik yang menghancurkan terhadap Stalin, tetapi gagal memberikan kritik sistemik mengenai bagaimana orang ini dapat melakukan begitu banyak kejahatan selama waktu yang begitu lama. Ini juga merupakan periode optimisme bahwa sistem sosialis Soviet akan mampu mengungguli Barat yang kapitalis. Program Partai yang baru pada 1961 menjanjikan bahwa sosialisme “pada dasarnya” akan dibangun di Uni Soviet pada 1980. Kebijakan Khrushchev yang tidak menentu dalam urusan dalam negeri dan luar negeri (termasuk krisis rudal Kuba pada Oktober 1962) memicu penyingkirannya dari kekuasaan pada Oktober 1964. Ia digantikan oleh Leonid Brezhnev yang muram, yang selama masa pemerintahannya yang panjang (1964–82), persoalan pembaruan politik ditekankan. Bahkan rencana reformasi ekonomi yang sederhana yang dibayangkan oleh Perdana Menteri Alexei Kosygin pada 1960-an kandas menghadapi birokrasi Soviet, sebuah kekuatan yang mempertahankan kekuasaannya atas kepemilikan dan kebijakan. Musim Semi Praha (“*Prague Spring*”) di Cekoslowakia pada 1968 berusaha memperkenalkan “*sosialisme dengan wajah manusia*”, tetapi upaya untuk memperbaiki sistem komunis dengan membangun bentuk sosialisme yang lebih manusiawi dan demokratis dihancurkan oleh tank-tank Soviet dan sekutunya pada Agustus 1968. Meskipun demikian, “*sosialisme reformis*” ditempatkan dengan kokoh dalam agenda dan mengangkat persoalan-persoalan yang kelak akan diambil oleh Mikhail Gorbachev, tetapi pada saat itu sudah terlambat. Sebaliknya, tahun-tahun terakhir pemerintahan Brezhnev membawa masuk periode stagnasi (“*zastoi*”) ketika harapan besar akan détente dengan Barat berubah menjadi fase Perang Dingin yang kembali meningkat dan sangat berbahaya. Pada saat kematian Brezhnev bulan November 1982, jelas bahwa berbagai persoalan yang terus menumpuk berupa korupsi, tingkat pertumbuhan yang menurun, keterbelakangan teknologi yang semakin meningkat, dan kelesuan masyarakat secara umum perlu ditangani. Yuri Andropov memimpin Komite Keamanan Negara (KGB) sejak 1967, berada dalam posisi yang unik untuk mengamati berbagai penyakit masyarakat.

Ia secara singkat mengambil alih kepemimpinan antara kematian Brezhnev dan kematiannya sendiri, setelah masa jabatan yang singkat pada Februari 1984. Ia mengajukan pertanyaan mendasar: *“Kita tidak mengetahui negara tempat kita hidup.”* Tanggapan Andropov adalah sebuah program *“modernisasi otoriter”*, termasuk memperketat disiplin kerja, perjuangan melawan korupsi, dan pemulihan bentuk moralitas komunis. Setelah kematian Andropov, Konstantin Chernenko yang sedang sakit berjuang untuk memperoleh kekuasaan dalam waktu singkat. Kematian Chernenko pada Maret 1985 akhirnya memungkinkan generasi baru mengambil alih kendali kepemimpinan. Selama tujuh puluh empat tahun, antara 1917 dan 1991, Uni Soviet berupaya menciptakan suatu tatanan sosial alternatif yang didasarkan pada penafsirannya sendiri terhadap pemikiran Marxis yang dipadukan dengan pemahaman Leninis mengenai perlunya sebuah partai yang dominan. Sistem Soviet bertahan jauh lebih lama daripada yang diperkirakan oleh sebagian besar pengkritiknya pada masa awal, tetapi pada akhirnya antara 1989 dan 1991 sistem tersebut runtuh. Warisan dari eksperimen yang gagal tersebut tetap hidup di Rusia hingga sekarang. Uni Republik Sosialis Soviet (USSR) didirikan pada Desember 1922 sebagai sebuah persatuan republik-republik yang secara resmi berdaulat untuk memberikan bentuk politik kepada keragaman masyarakat dan bangsa dari republik baru tersebut, dan hal ini kemudian diberikan bentuk yuridis melalui pengadopsian konstitusi pertama Uni Soviet pada Januari 1924. Sistem tersebut berjalan selama terdapat suatu kekuatan yang berdiri di luar kerangka etno-federal, yaitu Partai Komunis Seluruh Uni (Bolshevik) (VKP(b)), yang berganti nama menjadi Partai Komunis Uni Soviet (CPSU) pada Kongres Partai ke-19 pada 1952. Dengan diluncurkannya perestroika (*“restrukturisasi”*) oleh Sekretaris Jenderal baru CPSU, Mikhail Gorbachev, pada 1985, CPSU secara bertahap kehilangan potensi pemersatunya ketika koherensi internalnya sendiri mulai larut. Gorbachev meluncurkan program reformasi yang ambisius, yang dikenal sebagai perestroika, yang pada 1989 tidak hanya telah mengubah Uni Soviet tetapi juga memungkinkan pembebasan negara-negara blok Soviet yang menjadi sekutunya dan mengakhiri Perang Dingin. Namun, reformasinya juga memungkinkan aspirasi nasional yang sebelumnya tertidur untuk kembali hidup, yang secara mengejutkan dipimpin oleh Rusia, yang menyebabkan negara tersebut terpecah pada akhir Desember 1991. Reformasi Gorbachev mempercepat proses ganda, masing-masing dengan logikanya sendiri tetapi menjadi sangat menghancurkan ketika keduanya bertemu, yaitu pembubaran sistem komunis dan disintegrasi negara.

Perestroika: Dari Rasionalisasi Menuju Disintegrasi

Pengangkatan seorang Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet (CPSU) yang melakukan reformasi pada Maret 1985 menggerakkan suatu periode *“transisi”* yang terus berlangsung hingga saat ini, meskipun Putin menolak istilah tersebut.

Gorbachev berkuasa sebagai anak didik Andropov, tetapi program reformasinya dengan cepat melampaui gagasan yang masih tersisa tentang "*modernisasi otoriter*". Dalam politik domestik, reformasi skala penuh diterapkan, sementara pada saat yang sama ia berusaha mengakhiri Perang Dingin dengan Barat, suatu perjuangan yang semakin ia anggap sia-sia dan merugikan semua pihak yang terlibat. Gorbachev berkuasa dengan pemahaman yang jelas bahwa cara lama dalam memerintah Uni Soviet tidak dapat dilanjutkan lagi, tetapi rencana-rencananya untuk melakukan perubahan segera berhadapan dengan sejumlah kenyataan yang sulit. Ia mencapai beberapa keberhasilan penting dalam mendemokratisasikan sistem dan sekitar tahun 1989 tatanan komunis secara efektif telah dibongkar dan negara sedang bergerak menuju demokrasi konstitusional, tetapi akumulasi persoalan ekonomi dan nasional memicu disintegrasi negara pada Desember 1991. Komunisme reformasi telah berubah menjadi reformasi komunisme, dan pada akhirnya menjadi tidak ada komunisme sama sekali. Dalam kunjungan ke Kanada bulan Mei 1983, Gorbachev dan duta besar Soviet, Alexander Yakovlev (yang kemudian memainkan peran besar dalam membentuk reformasi), berpendapat bahwa "*Kita tidak dapat terus hidup dengan cara seperti ini*". Gorbachev berkuasa dengan komitmen untuk memodernisasi sistem Soviet. Dalam kurun waktu enam tahun, perestroika bergerak melalui lima tahap utama: upaya awal untuk merasionalisasi sistem mencakup sejumlah tujuan ekonomi yang ambisius, suatu program yang dikenal sebagai "percepatan" ("*uskorenie*"); kemudian fokus beralih ke tahap liberalisasi, termasuk perkembangan pesat "*glasnost*" ("*keterbukaan*"), yang di dalamnya masa lalu tragis negara tersebut diungkapkan dalam seluruh kebiadaban dan kejayaannya; persoalan-persoalan politik mendasar mulai dibahas dalam tahap berikutnya yang dikenal sebagai demokratisasi ("*demokratizatsiya*"), yang mulai mengubah masyarakat dan sistem politik melalui pemilihan umum yang relatif bebas dan adil serta pembentukan Badan Legislatif yang sesungguhnya, yang terbebas dari kendali CPSU; tetapi semua ini mulai memicu pembubaran fondasi tatanan komunis, ketika masa lalunya didiskreditkan dan dasar legitimasinya kehilangan legitimasi; yang berpuncak pada 1991 dalam tahap akhir berupa disintegrasi negara itu sendiri. Begitu perubahan dimulai, perubahan tersebut tidak dapat dibatasi oleh reformasi yang dipimpin oleh rezim, dan tekanan untuk melakukan pembaruan radikal menjadi sangat kuat. Upaya pada Agustus 1991 oleh sekelompok kaum konservatif untuk membendung arus perubahan justru mempercepat hasil yang ingin mereka cegah: pembubaran total sistem pemerintahan komunis dan, pada akhir tahun tersebut, disintegrasi Uni Soviet.

Gorbachev tidak berkuasa dengan seperangkat kebijakan yang jelas; tetapi ia memiliki sikap terhadap perubahan yang tetap ia pegang hingga akhir yang penuh kepahitan. Ia bermaksud mencapai modernisasi sistem komunis melalui perestroika, dan dalam kerangka tersebut meluncurkan apa yang ia sebut sebagai "*revolusi di dalam revolusi*" untuk menyelamatkan sistem dan bukan untuk menghancurkannya.

Gorbachev memahami bahwa sistem tersebut sedang mengalami berbagai persoalan besar, termasuk pertumbuhan ekonomi yang menurun, kerusakan sosial, kerahasiaan yang berlebihan dalam kehidupan ilmiah dan politik, serta kemerosotan pemerintahan yang berkuasa, serta elite menjadi kelas yang korup dan tidak kompeten. Gorbachev tidak pernah menolak gagasan dasar bahwa sistem komunis tetap merupakan sistem yang layak dan, dalam beberapa hal, lebih unggul daripada demokrasi kapitalis. Tujuannya adalah memberikan komunisme Soviet dinamisme yang dinikmati oleh kapitalisme, tetapi tanpa kelemahan-kelemahannya. Ia sama sekali tidak pernah bermaksud melemahkan apa yang disebut "*peran utama*" Partai Komunis atau menghancurkan ekonomi terencana. Perestroika, tegasnya, "*didorong oleh kesadaran bahwa potensi sosialisme telah kurang dimanfaatkan*".

Langkah Keliru Gorbachev Dalam Bidang Ekonomi dan Kegagalan Reformasi Sistem Soviet

Dalam bidang ekonomi, sejak awal Gorbachev telah mengambil langkah yang keliru: kebijakan percepatan berusaha mencapai transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan output, dan pada akhirnya tidak mampu mencapai keberhasilan jangka panjang. Hal ini disertai dengan kampanye anti-alkohol yang menyebabkan negara kehilangan hampir sepertiga pendapatan pajaknya. Demikian pula, "*glasnost*" pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai kebebasan berbicara, melainkan untuk mengungkap kegagalan birokrasi yang korup, dan dengan demikian memperkuat sistem Soviet. Namun, keterbukaan segera berubah menjadi pencarian kebenaran yang menghancurkan represi Leninisme dan Stalinisme dan berkembang dengan kekuatannya sendiri, terlepas dari batasan-batasan yang pada awalnya ingin diterapkan Gorbachev. Perubahan-perubahan yang dimulai oleh Gorbachev mulai melampaui kemampuannya untuk mengendalikan perubahan tersebut. Pembentukan Democratic Union pada 9 Mei 1988 menandai dimulainya kembali era politik multipartai, tetapi sikap anti-komunismenya yang radikal menunjukkan bahwa upaya Gorbachev untuk membatasi dan mengendalikan pluralisme politik dalam kerangka "*komunisme reformasi*" akan gagal dan tatanan komunis akan bubar.

Di beberapa republik non-Rusia, gerakan informal tersebut mengambil bentuk front-front rakyat, dengan Sajudis di Lituania sebagai salah satu yang terbesar, mewakili aspirasi untuk otonomi nasional dan kemudian kemerdekaan. Puncak harapan Gorbachev bahwa sosialisme yang manusiawi dan demokratis dapat menggantikan sistem lama yang telah mati adalah Konferensi Partai ke-19 pada Juni–Juli 1988, ketika ia menguraikan program perubahan politik demokratis dan peran baru bagi Uni Soviet di dunia. Gorbachev gagal dalam pencalonan diri sebagai Presiden dalam pemungutan suara nasional, karena tidak memiliki mandat rakyat, ia tersisih dan Boris Yeltsin, yang menjadi kepala Kongres Deputi-Deputi Rakyat Rusia pada Mei 1990, kemudian mengikuti pemilihan langsung pada Juni 1991 untuk menjadi presiden pertama Rusia.

Melalui upaya yang semakin putus asa untuk merundingkan Perjanjian Persatuan (Union Treaty) yang baru, Gorbachev berharap mengubah apa yang pada dasarnya merupakan negara kesatuan menjadi komunitas bangsa-bangsa yang benar-benar bersifat konfederal. Harapan-harapan tersebut pupus dengan deklarasi kemerdekaan Lituania pada 11 Maret 1990, yang diikuti oleh Georgia pada 9 April 1991 dan semua Republik lainnya pada akhir tahun tersebut. Dalam urusan luar negeri, Gorbachev mengembangkan gagasan "*pemikiran politik baru*" ("*new political thinking/NPT*"), yang didasarkan pada gagasan saling ketergantungan dan hubungan kerja sama baru dengan Barat. Dalam kunjungannya ke Parlemen Eropa di Strasbourg pada September 1988, ia berbicara mengenai pembentukan "*rumah Eropa bersama*" ("*common European home*"), tetapi tidak jelas bentuk seperti apa yang akan diambilnya. Pada 1989, negara-negara Eropa Timur dalam blok Soviet menanggapi perkataan Gorbachev mengenai perlunya perubahan secara serius, dan sejak musim gugur tahun tersebut, satu demi satu rezim komunis runtuh. Runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 menandai berakhirnya kekuasaan Soviet di Eropa Timur secara simbolis. Hal ini sangat memengaruhi seorang anggota KGB yang saat itu bertugas di Republik Demokratik Jerman, Vladimir Putin.

Gorbachev memfasilitasi penyatuan Jerman, meskipun ia banyak dikritik karena gagal menjamin dalam bentuk perjanjian status demiliterisasi wilayah timur negara baru tersebut dan Eropa Timur secara umum. Perluasan NATO untuk mengisi kekosongan keamanan yang dipersepsikan kemudian menjadi salah satu persoalan paling kontroversial pada era pasca-komunis. Di dalam negeri, perlawanan terhadap kebijakan Gorbachev berkembang hingga pada titik ketika sekelompok orang bersiap untuk merebut kekuasaan melalui kudeta. Persoalan khususnya adalah rencana penanda-tanganan Perjanjian Persatuan yang baru pada 20 Agustus 1991, tetapi para perencana kudeta juga prihatin terhadap disintegrasi ekonomi dan hilangnya kendali politik. Selama tiga hari pada Agustus (19–21), Gorbachev diisolasi di dacha-nya di Foros, Krimea, sementara musuh bebuyutannya, Boris Yeltsin, muncul dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Yeltsin telah terpilih sebagai presiden Rusia dengan 57% suara pada 12 Juni 1991, sehingga ia memiliki legitimasi rakyat untuk berbicara atas nama negara. Gambaran Yeltsin berdiri di atas sebuah tank di luar Gedung Putih Rusia (pusat pemerintahan Rusia) kemudian menjadi symbol puncak persatuan antara rakyat dan kepemimpinan Rusia. Pada hari-hari setelah kudeta, Yeltsin mengakhiri pemerintahan Komunis dengan melarang Partai tersebut di Rusia. Upaya untuk menyelamatkan Uni Soviet pada bulan-bulan terakhir 1991 gagal. Tekanan untuk meningkatkan kedaulatan republik-republik berkembang menjadi tuntutan untuk merdeka. Pertemuan para pemimpin Belarus, Rusia, dan Ukraina di Belarus pada 7–8 Desember sepakat untuk mengakhiri Uni Soviet, dan sebagai gantinya membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka ("*Commonwealth of Independent States/CIS*").

CIS diperluas pada 21 Desember mencakup sebagian besar negara-negara bekas Soviet (dengan pengecualian republik-republik Baltik dan Georgia). Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden pada 25 Desember 1991, dan pada 31 Desember Uni Soviet secara resmi tidak eksis lagi. Reformasi Gorbachev terhadap sistem Soviet justru memicu kehancurannya. Perdebatan mengenai apakah Uni Soviet dapat direformasi sambil tetap mempertahankan karakter komunisnya terus berlangsung hingga saat ini. Perestroika Gorbachev dengan jelas menunjukkan potensi evolusioner sistem tersebut, tetapi evolusi ini pada akhirnya berarti transendensi secara damai atas sistem yang hendak diselamatkannya. Dari satu sudut pandang, reformasi Gorbachev merupakan keberhasilan besar. Pada 1991 negara tersebut telah menjadi relatif demokratis, menyelenggarakan pemilihan umum yang paling bebas dan adil yang pernah disaksikan negara itu, sedang bergerak menuju ekonomi pasar, persatuan negara sedang berubah menjadi konfederasi negara-negara berdaulat, dan Perang Dingin telah diatasi sebagian besar melalui upaya-upaya Soviet, namun, krisis terminal sistem tersebut pada 1991 mengungkapkan kelemahan-kelemahan struktural yang mendalam dalam konsep reformasi Gorbachev dan dalam kapasitas sistem untuk berubah sambil tetap mempertahankan orientasi yang dapat dikenali sebagai sosialis. Gorbachev tetap konsisten dalam komitmennya terhadap sosialisme demokratis yang manusiawi dengan pasar yang terbatas dalam sebuah Federasi baru negara-negara Soviet. Namun, upayanya untuk membatasi perubahan pada gagasan-gagasannya yang telah ditentukan sebelumnya, segera berbenturan dengan sejumlah kenyataan yang keras: aspirasi kemerdekaan di sejumlah republik, khususnya Estonia, Latvia, dan Lituania, yang secara paksa dimasukkan ke dalam Uni Soviet oleh Stalin pada 1940; ketidak-stabilan yang melekat pada sistem yang setengah dimarketisasi – sistem tersebut harus menjadi salah satu atau yang lainnya, yaitu ekonomi terencana atau ekonomi pasar. Upaya untuk mereformasi sistem Soviet memperlihatkan berbagai kontradiksinya, dan kontradiksi-kontradiksi tersebut pada akhirnya menghancurkan sistem tersebut. Negara itu mereformasi dirinya sendiri hingga keluar dari keberadaannya.

Rusia Pasca-Komunis: Era Boris Yeltsin

Memasuki abad ke-21, Rusia telah menjadi sebuah negara yang sangat berbeda. Kekaisaran Tsar telah terpecah, pemerintahan otokratis telah digulingkan, sistem komunis Soviet telah berlalu, dan Uni Soviet juga telah terdisintegrasi, meninggalkan lima belas republik penerus yang terpisah. Untuk pertama kalinya, Rusia yang merdeka mengembangkan sesuatu yang menyerupai sebuah negara-bangsa. Secara formal, Rusia merupakan negara “*penerus*” (“*continuer*”) Uni Soviet, dan dengan demikian mengambil alih tanggung jawab atas kewajiban perjanjian dan utang negara sebelumnya, dan Rusia juga mewarisi kursi permanen di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC) dan senjata nuklir seluruh Uni Soviet.

Perekonomian mengalami distorsi yang parah akibat ekonomi terencana Soviet serta tidak adanya kepemilikan swasta atas alat-alat produksi dan kerangka hukum bagi suatu tatanan pasar. Rusia kini terlibat dalam suatu proses luar biasa berupa rekonstruksi politik, yang dimaksudkan untuk membangun demokrasi liberal. Politik demokratis, yang didefinisikan sebagai persaingan prosedural untuk memperoleh kekuasaan politik dan pertanggungjawaban pemerintah kepada lembaga legislatif yang dipilih secara bebas serta tunduk pada supremasi hukum, disertai ruang publik untuk perdebatan, kritik, dan informasi, akhirnya tiba di Rusia. Pemerintahan Yeltsin berkomitmen agar Rusia menjadi negara pasar yang demokratis, bersekutu dengan negara-negara Barat yang maju dan terintegrasi ke dalam ekonomi dunia. Namun, terdapat jauh lebih sedikit kesepakatan mengenai bagaimana ketiga tujuan tersebut – demokratisasi, marketisasi, dan integrasi internasional – harus dicapai. Terdapat kesepakatan luas: perbatasan Rusia yang muncul sebagai negara merdeka pada 1991 tidak boleh diubah, betapapun tidak adil dan sewenang-wenangnya perbatasan tersebut dianggap oleh banyak pihak. Sekitar 25 juta orang Rusia secara etnis mendapati diri mereka tersebar di 14 negara lain yang baru merdeka. Namun, penolakan Yeltsin untuk memanfaatkan keluhan nyata maupun yang dibayangkan dari diaspora Rusia demi memperoleh keuntungan politik merupakan salah satu pencapaian utamanya.

Politik pada era pasca-komunis akan berlangsung di Rusia, dan bukan di suatu Uni Soviet yang dibangun kembali secara mitologis dalam bentuk apapun. Selama dua tahun pertama setelah kemerdekaan, politik Rusia dilanda perjuangan untuk mengadopsi konstitusi baru. Parlemen dua tingkat yang diwarisi Rusia dari Uni Soviet terbukti tidak dapat berfungsi dan pada akhirnya mengulangi situasi kekuasaan ganda tahun 1917, dengan Presiden dan Parlemen sama-sama memiliki kekuasaan eksekutif. Tanggal 21 September 1993, Yeltsin secara sepihak membubarkan Kongres Deputi-Deputi Rakyat, memicu konfrontasi bersenjata, yang baru berakhir ketika Yeltsin mengerahkan tank pada 3–4 Oktober. Yeltsin memanfaatkan kemenangannya untuk memperkuat kekuasaan kepresidenan. Konstitusi akhirnya disahkan melalui referendum pada 12 Desember 1993, menetapkan pola bagi pemungutan suara yang bermasalah. Sebuah Badan Legislatif baru juga dipilih, yang dalam pemilihan-pemilihan berikutnya didominasi oleh kaum populis baru, kaum nasionalis, dan Partai Komunis Federasi Rusia (CPRF) yang dibentuk kembali. Rusia kini memasuki periode stabilitas politik yang relatif, meskipun legitimasi sistem politik baru tersebut dipertanyakan karena kekerasan yang menyertai kelahirannya dan pemilihan-pemilihan yang cacat yang membentuknya. Namun demikian, konstitusi tersebut pada dasarnya merupakan dokumen liberal, yang menyatakan berbagai kebebasan yang diharapkan dari sebuah negara demokrasi liberal, meskipun pembagian kekuasaan antara Parlemen dan Presiden tetap tidak seimbang.

Pola perpaduan antara kekuasaan ekonomi dan politik pun terbentuk dan tetap bertahan hingga saat ini, mendorong korupsi dan statisme ekonomi neo-Soviet. Karena takut bahwa kaum neo-komunis dan para penentang langkah menuju pasar dan integrasi internasional akan berkuasa dalam pemilihan presiden 1996, Yeltsin sempat mempertimbangkan gagasan untuk membatalkan pemilihan presiden sama sekali. Sebaliknya, ia memanfaatkan sumber daya teman-teman oligark barunya dan melancarkan serangan propaganda yang mahal (dengan bantuan para penasihat Amerika) yang membawanya ke jabatan untuk masa jabatan kedua. Meskipun sebagian besar waktunya berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, Yeltsin mendominasi politik hingga akhir dekade tersebut. Meskipun Yeltsin secara formal tetap berkomitmen terhadap perkembangan demokrasi Rusia, beberapa karakteristik justru melemahkan ambisi tersebut. Yang pertama adalah masuknya kepentingan ekonomi secara tidak sehat ke dalam proses pengambilan keputusan. Privatisasi yang cepat dan kacau sejak awal 1990-an melahirkan kelas baru para pemilik kekayaan ekonomi yang kuat, yaitu para oligark. Dukungan mereka terhadap pemilihan kembali Yeltsin pada 1996 membawa mereka ke pusat proses politik dan melahirkan apa yang dikenal sebagai “keluarga” (*family*), yaitu perpaduan antara anggota keluarga Yeltsin, politisi, dan oligark. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Boris Berezovsky, yang menggunakan pengaruh politik sebagai sumber daya ekonomi utama. Banyak lainnya pada masa ini memanfaatkan pengetahuan dari dalam untuk memperoleh aset-aset ekonomi dengan harga yang hanya sebagian kecil dari nilai sebenarnya. Pada tahun-tahun inilah kerajaan bisnis Mikhail Khodorkovsky (perusahaan minyak Yukos), Roman Abramovich (bersama Berezovsky sebagai pemimpin Sibneft), Vladimir Potanin (Norilsk Nickel), Vladimir Gusinsky (kerajaan perbankan dan media Media-Most), dan banyak lainnya dibangun. Masa kejayaan mereka berlangsung antara pemilihan presiden 1996, setelah itu kekuasaan oligarki secara keseluruhan menurun, meskipun sebagai individu mereka tetap menjadi pemain penting. Karakteristik kedua adalah kekuasaan kepresidenan yang berlebihan. Diberikan kewenangan yang luas oleh Konstitusi 1993 sebagai bagian dari rancangan kelembagaan yang secara sengaja dimaksudkan untuk memastikan kekuasaan yang memadai bagi eksekutif guna melaksanakan reformasi, kepresidenan tidak memiliki pembatasan yang memadai. Terlalu banyak keputusan diambil oleh kelompok-kelompok kecil yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam kasus keputusan untuk melancarkan perang Chechnya pertama pada Desember 1994.

Rusia di Era Vladimir Putin

Sejak tahun 2000, Rusia secara “*de facto*” diperintah oleh Vladimir Putin, penguasa Rusia yang paling lama menjabat, sejak Joseph Stalin. Lebih dari dua puluh tahun pemerintahannya, telah ditandai oleh perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan masyarakat Rusia, serta dalam kebijakan luar negeri.

Setelah periode penuh gejolak pada tahun 1990-an yang “*bergemuruh*”, dengan terobosan-terobosan besar berupa transisi rezim, reformasi pasar, dan transformasi negara, Rusia di bawah Putin beralih ke model stabilisasi pasca-revolusi yang konservatif. Pergeseran pada tahun 2000-an berkontribusi pada munculnya otoritarianisme personalistik di tengah pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Pada tahun 2020-an, dorongan untuk mempertahankan kekuasaan Putin dengan segala cara membawa Rusia dari jalur konservatif ke jalur reaksioner, yang mungkin membuka jalan bagi kemerosotan yang tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian, era Putin dapat dinilai sebagai suatu “*gelombang balik*” atau kontra-revolusi dalam hal dinamika rezim politik dan integrasi internasional Rusia.

Meskipun mengalami kemunduran besar, era Putin tidak dapat dianggap sebagai kembalinya Rusia secara penuh “kembali ke Uni Soviet”, terlepas dari gagasan dan kepentingan tertentu dari elite dan warga Rusia, yang memandang versi Uni Soviet yang direvisi dan diperbarui sebagai model bagi Rusia. Selama dua dekade pertama abad kedua puluh satu, Rusia melanjutkan proses modernisasi sosial-ekonomi yang tidak berhenti bahkan di tengah latar belakang “gelombang balik”. Namun, laju perubahan-perubahan ini sangat melambat, terutama pada tahun 2010-an–2020-an, dan prospeknya untuk masa depan tampak semakin diragukan. Di antara banyak peristiwa penting yang membentuk lintasan Rusia pada era Putin, empat titik balik utama, atau “titik-titik kritis” (“*critical junctures*”), patut mendapat perhatian khusus. Yang pertama adalah kenaikan Putin yang tiba-tiba ke tampuk kekuasaan pada 1999–2000, yang dihasilkan dari “perang suksesi Yeltsin” dan pergeseran Rusia selanjutnya menuju “modernisasi otoriter”. Titik kritis kedua adalah serangkaian guncangan domestik dan internasional, dari gelombang protes politik besar pada 2011–12 hingga penggulingan Presiden Yanukovych di Ukraina pada 2014, yang berkontribusi terhadap aneksasi Krimea oleh Rusia dan konflik yang terus berlangsung dengan Barat setelahnya. Titik balik ketiga adalah reformasi konstitusi tahun 2020, yang memungkinkan Putin memperpanjang kekuasaan presidennya hingga tahun 2036. Dan akhirnya, titik balik keempat ditandai oleh dimulainya intervensi militer Rusia di Ukraina pada Februari 2022; kemungkinan besar, keputusan politik terburuk yang pernah dibuat oleh kepemimpinan Rusia.

Awal era Putin merupakan persoalan dalam perjuangan antara berbagai segmen elite Rusia untuk suksesi kepemimpinan setelah Boris Yeltsin. Sebagai seorang pemimpin baru yang berusia 47 tahun, dinamis, dan energik, ia dipersepsikan sebagai kontras yang tajam dengan pendahulunya yang menua, sakit, dan sangat tidak populer; Putin, seorang pejabat negara yang sebelumnya tidak dikenal luas, menikmati peningkatan popularitas yang stabil sejak awal. Hal ini juga bertepatan dengan berakhirnya resesi transformasi ekonomi Rusia yang panjang dan berkepanjangan, yang telah dimulai sebelum keruntuhan Soviet dan berlangsung hingga krisis dan devaluasi rubel pada tahun 1998.

Pada saat yang sama, Rusia mampu memulihkan kontrolnya atas Chechnya setelah kemenangan dalam Perang Chechnya Kedua, dan hal ini secara luas dianggap sebagai pembalasan yang signifikan setelah kerugian besar dalam Perang Chechnya Pertama. Semua faktor ini tidak hanya meningkatkan popularitas Putin tetapi juga memberinya kebebasan penuh dalam hal strategi untuk kepresidenan. Strategi ini menyiratkan prioritas pada pertumbuhan ekonomi dan penguatan negara. Pada awal masa kepresidenannya, Putin meluncurkan reformasi federal yang bertujuan membangun hierarki formal dan informal berdasarkan subordinasi wilayah dan pemerintah kota terhadap pusat federal serta rantai komando dari atas ke bawah dalam lembaga-lembaga negara (dikenal sebagai “*vertikal kekuasaan*”). Hal ini merupakan kontras yang tajam dengan desentralisasi yang kacau dan pemerintahan yang sewenang-wenang di banyak unit subnasional pada tahun 1990-an. Resentralisasi negara Rusia menghilangkan hambatan terhadap perkembangan bisnis. Secara bersamaan, pemerintah Rusia yang baru memprakarsai program reformasi ekonomi berskala besar, termasuk reformasi pajak, privatisasi tanah pertanian dan perubahan-perubahan lain yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan. Meskipun program tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan, program itu berkontribusi terhadap pemulihan Rusia pascatransi di tengah meningkatnya harga minyak di pasar global pada tahun 2000-an. Kebijakan makroekonomi yang konservatif dan penggunaan Dana Stabilisasi untuk mempertahankan pendapatan tambahan dari ekspor minyak berperan penting dalam kemampuan Rusia menghadapi krisis ekonomi global 2008–2009. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Rusia sebesar 7 persen antara 1999 dan 2008 sangat berkontribusi terhadap tingginya tingkat dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Putin. Sementara itu, Kremlin mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi otonomi politik semua aktor, yang dipaksa untuk tunduk dalam kerangka “*vertikal kekuasaan*” atau dimarginalkan, jika tidak disingkirkan.

Selama tahun 2000-an, parlemen Rusia menjadi sepenuhnya dikendalikan oleh Kremlin: Dewan Federasi tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat dan kehilangan seluruh pengaruh politiknya, sementara partai utama pro-Putin, Rusia Bersatu (“*United Russia*”), mengambil kendali kuat atas Duma Negara dan telah mempertahankan mayoritas kursi yang kuat di sana hingga saat ini. Para kepala eksekutif regional (Gubernur) kehilangan sebagian pengaruh kekuasaan dan menjadi tunduk kepada Kremlin, terutama setelah tahun 2004, ketika pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat dibatalkan dan hierarki “*vertikal kekuasaan*” dibentuk. Lebih lanjut, undang-undang Pemilu dan peraturan mengenai politik kepartaian diubah untuk mempertahankan pemilu di Rusia di bawah kontrol ketat Kremlin. Para pelaku bisnis, yang memainkan peran sangat besar dalam politik dan pembuatan kebijakan Rusia pada tahun 1990-an, diintegrasikan ke dalam kerangka korporatisme negara yang baru dibentuk, dan beberapa oligark kehilangan pengaruh dan/atau aset mereka.

Media-media utama, termasuk saluran televisi nasional, diintegrasikan ke dalam perusahaan-perusahaan holding yang dikendalikan Kremlin, dan banyak LSM dikooptasi oleh Kremlin. Dengan demikian, selama dua masa jabatan pertama kepresidenan Putin, kerangka politik dan kelembagaan rezim otoritarianisme elektoral Rusia dibentuk dan dikembangkan. Di arena internasional, era Putin dimulai dengan dukungan sepenuh hati terhadap Amerika Serikat setelah serangan teroris 11 September dan upaya kerja sama dengan NATO. Namun, karena Rusia tidak segera memperoleh manfaat dari kebijakan luar negerinya yang pro-Barat, meningkatnya kekecewaan di kalangan elite, mendorong negara itu ke arah yang berlawanan, terutama setelah “revolusi-revolusi warna”, yang secara luas dipersepsikan sebagai konspirasi anti-Rusia yang diatur oleh AS dan Uni Eropa. Pada tahun 2007, dalam pidatonya pada konferensi keamanan internasional di Munich, Putin secara terbuka menolak kerja sama dengan Barat dan menegaskan kontrol eksklusif Rusia atas “lingkup pengaruhnya”. Setelah itu, pemulihan hubungan berakhir, membuka jalan bagi serangkaian konflik internasional. Secara keseluruhan, periode tahun 2000-an ditandai oleh pemulihan dan perkembangan pesat Rusia setelah satu dekade stagnasi serta oleh pembangunan institusi-institusi otoriter secara sadar dan konsisten dan pergeseran menuju sikap anti-Barat. Kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan ini memainkan peran penting dalam perubahan-perubahan selanjutnya pada tahun 2010-an. Tahun 2008 Putin mengundurkan diri sebagai Presiden, setelah berakhirnya dua masa jabatan berturut-turutnya dan menyerahkan jabatan tersebut kepada penerus yang dipilihnya, Dmitry Medvedev, dengan tetap memegang jabatan sebagai Perdana Menteri. Selama masa kepresidenan Medvedev, Rusia mengalami dampak serius dari krisis ekonomi global 2008–2009, tetapi strategi keseluruhan Kremlin diarahkan pada kemajuan ekonomi dan teknologi yang besar, demi pertumbuhan dan pembangunan yang cepat. Strategi ini diberi label “modernisasi”, mencakup pembaruan kerja sama dengan AS dan banyak pernyataan mengenai keterbukaan dan transparansi negara Rusia, meskipun demokratisasi politik dianggap sebagai hal yang tabu dan pendekatan Kremlin terhadap “modernisasi” terutama bersifat teknokratis. Pada akhirnya, “modernisasi”, alih-alih menjadi arah strategis bagi negara tersebut, berubah menjadi kampanye yang berumur pendek yang menghasilkan sedikit perubahan kebijakan nyata—beberapa di antaranya gagal atau hanya membawa hasil kecil dan sementara yang hampir seluruhnya dilupakan pada akhir masa kepresidenan Medvedev. Namun demikian, bahkan liberalisasi yang kecil dan dangkal selama tahun-tahun ini sangat berkontribusi terhadap semakin meningkatnya aktivisme politik. September 2011, pada awal kampanye untuk pemilihan Duma Negara, Putin dan Medvedev mengumumkan pertukaran jabatan: Putin merencanakan kembali ke kursi kepresidenan pada tahun 2012, sementara Medvedev setuju untuk mengambil jabatan Perdana Menteri, yang saat itu dipegang oleh Putin. Mereka secara terbuka mengungkapkan bahwa solusi semacam itu telah diatur bahkan sebelum dimulainya masa kepresidenan Medvedev.

Langkah tersebut secara luas dianggap sebagai sebuah penipuan. Dengan latar belakang kampanye yang tidak adil dan tuduhan kecurangan pemilu dalam skala besar, hal tersebut menjadi pemicu bagi protes besar setelah Pemilu. Meskipun Kremlin mampu menghadapi aktivisme protes dan mempertahankan pemilihan presiden pada Maret 2012 di bawah kendali ketatnya, gelombang protes anti-Putin menjadi tantangan besar bagi otoritarianisme Rusia.

Tahun 2013 Rusia memberikan tekanan besar terhadap Ukraina, yang bermaksud menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, suatu langkah yang dianggap Kremlin akan menimbulkan kerugian serius bagi kepentingan kebijakan luar negeri Rusia dan merupakan suatu pelanggaran terhadap “lingkup pengaruh” eksklusifnya. Sebagai tanggapan terhadap tekanan tersebut, Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, menarik diri dari perundingan dengan Uni Eropa. Perubahan haluan ini memicu protes massa yang intens di Ukraina. Setelah tiga bulan konfrontasi dan upaya-upaya yang tidak berhasil untuk menggunakan kekerasan terhadap para demonstran, pada Februari 2014 Yanukovych melarikan diri dari Ukraina dan kemudian pindah ke Rusia. Penggulingan presiden melalui protes massa tersebut (yang didukung oleh Uni Eropa dan AS serta digambarkan di Ukraina sebagai “*revolusi martabat*”) mendapat reaksi keras dari Kremlin dan dipersepsikan sebagai ancaman besar terhadap kepemimpinan Rusia. Tanggapan tersebut sangat keras: beberapa hari setelah “*revolusi martabat*”, pasukan proksi Rusia mengambil alih Krimea (lokasi pangkalan Armada Laut Hitam Rusia, berdasarkan perjanjian yang diperpanjang oleh Yanukovych) dan memproklamasikan pemisahan Krimea dari Ukraina. Tidak lama kemudian, sebuah plebisit populer di Krimea dengan antusias menyetujui penggabungan wilayah tersebut dengan Rusia, dan pada Maret 2014 dua wilayah baru (Republik Krimea dan kota Sevastopol) secara resmi dianeksasi oleh Rusia. Pada saat yang sama, pasukan proksi Rusia menyerang wilayah-wilayah Ukraina Timur, berusaha mengambil alih pemerintahan-pemerintahan lokal dan memproklamasikan kemerdekaan dari Ukraina (wilayah-wilayah ini dianggap di Rusia sebagai “Novorossiya”, wilayah yang seharusnya diperlakukan sebagai protektorat Rusia). Di dua wilayah, Donetsk dan Luhansk, upaya-upaya tersebut berhasil, dan dua Republik yang memproklamasikan diri sendiri, yang didukung oleh Rusia, didirikan pada Mei 2014. Pemerintah Ukraina melawan kaum separatis, dan bentrokan kekerasan segera berubah menjadi perang berskala penuh, yang berhenti hanya setelah penandatanganan serangkaian perjanjian gencatan senjata di Minsk melalui mediasi Jerman dan Prancis. Tentara dan perwira Rusia terlibat dalam perang ini di pihak kaum separatis, meskipun Kremlin secara resmi menyangkal keterlibatan Rusia. Pergeseran besar Rusia menuju kebijakan luar negeri yang agresif dan ekspansionis didorong oleh Putin. Ia secara pribadi membuat keputusan mengenai aneksasi Krimea dan terus berada di balik operasi-operasi Rusia di Ukraina Timur. Pergeseran tersebut memberikan dampak dramatis terhadap lintasan Rusia selanjutnya.

Intinya, Putin mengorbankan prospek pertumbuhan dan pembangunan negara demi ambisi geopolitik Kremlin. Satu-satunya persoalan ekonomi yang menjadi perhatian Putin sebelum aneksasi Krimea adalah jumlah cadangan mata uang Rusia, apakah jumlahnya akan cukup untuk bertahan menghadapi sanksi Barat. Pada tahun 2014 Rusia kehilangan statusnya sebagai anggota klub G8 negara-negara demokrasi global (yang kemudian berubah menjadi G7), dan Uni Eropa serta AS memberlakukan sanksi individual terhadap para pejabat tinggi Rusia dan kemudian memperluasnya lebih jauh. Sebagai tanggapan, otoritas Rusia memberlakukan kontra-sanksi terhadap impor pangan dari Uni Eropa dan AS, sehingga semakin memperburuk masalahnya. Tidak mengherankan bahwa pertumbuhan ekonomi Rusia tetap lamban, dan pendapatan riil masyarakat Rusia secara bertahap menurun dari waktu ke waktu dan tidak pernah kembali ke tingkat tahun 2013, meskipun Bank Sentral menerapkan kebijakan makroekonomi yang hati-hati. Sejak saat itu, konfrontasi besar antara Rusia dan Barat semakin memburuk tanpa adanya harapan perbaikan selama era Putin. Awal tahun 2020 era Putin telah mencapai puncaknya. Tidak terlihat adanya tantangan langsung terhadap dominasi penuh Kremlin dalam politik domestik, dan secara internasional Rusia tampak tidak dapat ditembus meskipun ketegangan dengan Barat semakin meningkat.

Karena Putin tidak bersedia menyerahkan kekuasaan secara sukarela, ia perlu menemukan solusi yang memungkinkannya melanjutkan pemerintahannya setelah tahun 2024. Mengulangi cara memilih penerus yang loyal (serupa dengan Medvedev pada 2008–12) merupakan tindakan berisiko, terutama mengingat masa jabatan presiden di Rusia telah diperpanjang menjadi enam tahun pada tahun 2012, dari sebelumnya empat tahun. Beberapa upaya untuk menghidupkan kembali proyek “Negara Persatuan” antara Rusia dan Belarus (dengan rencana menjadikan Putin sebagai pemimpin supranasional) tidak menghasilkan apa-apa, karena penguasa Belarus yang telah lama menjabat, Aleksandr Lukashenka, tidak memiliki insentif untuk menyetujui mekanisme semacam itu tanpa memperoleh keuntungan besar. Pada akhirnya, Kremlin memilih solusi yang paling sederhana, yang lazim dilakukan oleh banyak negara otokratis di seluruh dunia. Pada Maret 2020, sebuah amendemen konstitusi mengenai “pengosongan” masa jabatan presiden sebelumnya bagi presiden yang sedang menjabat (yaitu Putin) dengan antusias disetujui oleh legislatif Rusia dan diajukan untuk plebisit nasional. Dalam praktiknya, perubahan konstitusi ini memberikan Putin peluang yang sangat baik untuk mempertahankan kekuasaan presiden hingga tahun 2036. Sebelum plebisit, para pejabat tinggi Rusia tidak merahasiakan fakta bahwa tujuan utama menyetujui amendemen konstitusi ini adalah mempertahankan kekuasaan Putin selama mungkin dan dengan cara apa pun, dengan tujuan melembagakan rezim personalistik.

Meskipun pelaksanaan niat Kremlin untuk mempertahankan dominasi Putin semakin bergantung pada ketakutan terhadap represi dan perluasan kekuasaan lembaga-lembaga penegak hukum, perangkat dan insentif ini hampir tidak produktif bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara dan justru berkontribusi terhadap kemerosotan dan degradasinya lebih lanjut. Banyak ahli menganggap situasi ini sebagai perangkap stagnasi, yang tidak dapat diatasi di bawah rezim politik saat ini. Pada awal tahun 2022, proses penuaan Putin dan lingkaran terdekatnya dipandang sebagai tantangan utama terhadap dominasi jangka panjangnya di tengah meningkatnya isolasionisme dan konfrontasi dengan Barat. Dari apa yang kita ketahui mengenai otoritarianisme personalistik dalam perspektif komparatif, kesinambungan semacam ini dapat mengakibatkan semakin memburuknya masalah-masalah Rusia dari waktu ke waktu. Hal ini berarti bahwa era Putin dapat berubah menjadi ilustrasi nyata dari *The Autumn of the Patriarch*, sebuah novel tahun 1975 karya Gabriel García Márquez, di mana tokoh utamanya, seorang diktator Amerika Latin, mampu tetap berkuasa selama seratus tahun, membawa negaranya menuju kehancuran total, menjual sumber dayanya kepada orang asing, dan kemudian meninggal dunia. Sejauh mana proyeksi semacam itu dapat menjadi kenyataan bagi Rusia masih harus dilihat.

NATO dan Kemungkinan Perang dengan Rusia

Bulan Desember 2025, Sekretaris Jenderal NATO (North Atlantic Treaty Organization) Mark Rutte memperingatkan negara-negara sekutu agar bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Rusia dalam waktu lima tahun ke depan. Hal ini bukan sekadar retorika. Bagaimanapun perang Rusia dengan Ukraina berakhir, hasilnya kemungkinan kecil akan membuat Rusia menjadi lebih aman. Ukraina hampir pasti akan tetap menjadi “ancaman utama” bagi Rusia, namun, Ukraina hanyalah salah satu bagian dari lanskap ancaman yang menantang yang dihadapi Rusia. Dari sudut pandang Kremlin, situasi keamanan justru berada di jalur yang akan menjadi semakin buruk, bukan semakin baik, dalam tahun-tahun mendatang. Investasi Eropa dalam peningkatan kemampuan pertahanan nasional pada umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laju perkembangan geopolitik, dan hanya sedikit negara yang memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Namun, sebagian besar negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan mereka, meskipun belum cukup cepat, serta memperoleh sistem persenjataan baru yang oleh Rusia dinilai sangat mengancam.

Semakin menonjolnya partai-partai populis di Prancis, Inggris, dan Jerman—partai-partai yang dikenal memiliki pandangan lunak terhadap Rusia dan skeptis terhadap Uni Eropa—menimbulkan kemungkinan runtuhnya konsensus kebijakan Eropa yang ada, apabila partai-partai tersebut berkuasa dalam beberapa tahun mendatang. Namun, bahkan di dalam partai-partai tersebut terdapat dukungan terhadap Ukraina, sementara mayoritas masyarakat di seluruh Eropa memiliki pandangan negatif terhadap Rusia.

Di Hungaria, yang pemerintahnya memiliki pendekatan yang secara khusus bersahabat dengan Kremlin, dua pertiga masyarakatnya memiliki pandangan negatif terhadap Rusia. Hampir tidak ada prospek bahwa sikap yang sangat negatif terhadap Rusia di negara-negara garis depan—mulai dari Norwegia hingga Ukraina—akan berubah, atau negara-negara tersebut akan mengubah rencana mereka untuk terus mengembangkan kemampuan pencegahan dan pertahanan yang kuat. Dengan latar belakang peningkatan belanja pertahanan Eropa dan sistem persenjataan baru yang telah dikerahkan oleh negara-negara NATO, penilaian Rusia kemungkinan akan melihat Rusia sebagai negara yang semakin terancam. Kekhawatiran tersebut kemungkinan semakin diperburuk oleh terkikisnya kemampuan militer konvensional Rusia di Ukraina serta kemungkinan bahwa persoalan dalam mempertahankan jumlah dan kualitas personel militer akan menjadi semakin parah setelah perang saat ini berakhir. Bukan sesuatu yang mengejutkan apabila komunitas strategis Rusia mulai menggambarkan keadaan tersebut dengan istilah yang semakin mengkhawatirkan, mengingat adanya insentif birokratis dan anggaran yang jelas untuk melakukan persenjataan kembali. Kemungkinan adanya kesamaan dengan perkembangan persepsi ancaman Rusia setelah Perang Dingin—ketika kemampuan konvensional Rusia, menurut kata-kata Putin, telah “praktis runtuh”—juga patut dipertimbangkan. Pada awal 1990-an, Eropa Barat sedang mengurangi persenjataan dan berupaya menjalin hubungan dengan Rusia sebagai mitra. Eropa Timur sedang mengalami transisinya sendiri yang sulit dan hampir tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia. Swedia dan Finlandia juga tidak memiliki rencana untuk meninggalkan sikap netral mereka. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan situasi yang akan dihadapi Rusia dalam tahun-tahun mendatang. Era 1990-an, setelah kemampuan konvensional mengalami keruntuhan, Rusia beralih pada persenjataan nuklir untuk memperkuat kembali bobot geopolitiknya dan mengatasi meningkatnya kerentanannya. Pada 1993, pemerintah Rusia meninggalkan komitmen era Soviet untuk tidak menjadi pihak yang pertama kali menggunakan senjata nuklir (“*no-first-use*”). Doktrin militer baru tahun 1993 serta serangkaian dokumen strategis yang dikeluarkan sepanjang 1990-an dan awal 2000-an menempatkan senjata nuklir sebagai instrumen pencegahan sekaligus, apabila pencegahan tersebut gagal, sebagai sarana untuk berperang. Dari sudut pandang Moskow, perubahan ini diperlukan untuk mengimbangi melemahnya kemampuan konvensional Rusia, perluasan NATO ke arah timur, serta kemajuan persenjataan konvensional yang diperlihatkan dalam Perang Irak Pertama dan di Kosovo. Dalam lanskap keamanan Eropa yang baru, senjata nuklir diperkirakan akan memainkan peran yang semakin besar dalam perencanaan militer Rusia. Doktrin nuklir Rusia terbaru yang diterbitkan pada 2024 memberikan sedikit ruang untuk meragukan hal tersebut. Doktrin tersebut menjelaskan berbagai situasi yang dapat mendorong Rusia untuk melakukan eskalasi, termasuk apabila Rusia menerima “data yang dapat dipercaya” mengenai peluncuran senjata nuklir atau konvensional terhadap Rusia atau Belarus.

Meskipun dibingkai sebagai sesuatu yang bersifat defensif, doktrin baru Rusia tersebut memiliki implikasi ofensif yang mengkhawatirkan. Pandangan umum yang berlaku selama ini menyatakan bahwa selama Rusia masih terjebak dalam perang di Ukraina, Rusia tidak berada dalam posisi untuk melakukan serangan sembrono lainnya terhadap negara tetangga atau mengambil risiko konfrontasi militer langsung dengan NATO. Namun, pada 2021, pandangan umum juga menyatakan bahwa Rusia kecil kemungkinan akan melancarkan perang berskala penuh terhadap Ukraina. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut peringatan mengenai serangan Rusia yang akan segera terjadi sebagai kepanikan. Tahun 2021, pandangan umum menyatakan bahwa menginvasi Ukraina akan menjadi kesalahan besar dan tragis bagi Rusia. Namun, Putin memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda, meskipun pada akhirnya pandangan umum tersebut terbukti benar. Jika Putin benar-benar bertekad untuk memaksakan visinya mengenai keamanan Eropa di benua tersebut, ia mungkin akan menilai bahwa waktu tidak berpihak kepadanya, karena Eropa sedang berlomba memperkuat kembali kemampuan pertahanannya. Dalam kondisi tersebut, Putin dapat melancarkan serangan terhadap salah satu negara Baltik untuk menunjukkan bahwa Pasal 5 NATO pada dasarnya hanyalah ketentuan yang tidak memiliki kekuatan nyata. Ia mungkin terdorong oleh meningkatnya ketegangan antara Eropa dan Amerika Serikat serta kemungkinan bahwa Eropa tidak lagi dapat mengandalkan komitmen Amerika Serikat dalam memberikan “*extended deterrence*”. Perpecahan trans-Atlantik sebelum Eropa berhasil membangun pertahanan konvensional dan menyelesaikan persoalan bagaimana mencegah ancaman nuklir Rusia tanpa berada di bawah payung nuklir Amerika Serikat akan membuka peluang bagi Putin untuk mengejar ambisinya, sementara Rusia berlindung di balik kekuatan nuklirnya. Meskipun serangan terhadap kawasan Baltik belum tentu merupakan skenario dengan probabilitas tinggi, rekam jejak Putin dalam menggunakan ancaman nuklir terhadap negara non-nuklir menunjukkan bahwa skenario tersebut sepenuhnya realistis. Sebagai pelengkap persenjataan konvensional dan nuklirnya, Kremlin mempertahankan perangkat “*hybrid warfare*” yang luas. Dikembangkan dan disempurnakan selama beberapa dekade, perangkat tersebut mencakup kampanye disinformasi, penggunaan subversi politik dan agen-agen pengaruh, sabotase industri, serta pembunuhan terhadap lawan-lawan politik dan para pemimpin bisnis. Semua cara tersebut telah dikerahkan atau dicoba di Eropa dan akan terus diandalkan sebagai instrumen penting dalam persenjataan Rusia.

Pemilihan umum di seluruh Eropa—di Hungaria, Latvia, dan Swedia pada 2026 serta di Prancis dan Italia pada 2027—50 tentu akan dimanfaatkan oleh Kremlin untuk menebar perpecahan, memperkuat narasi mengenai bahaya menghadapi Rusia, serta mempromosikan dan mendukung partai-partai dan aktor politik yang bersahabat dengan Rusia, maupun pihak-pihak pengganggu yang semata-mata bertindak berdasarkan kepentingan oportunis.

Rekam jejak Kremlin dalam mencampuri politik domestik negara-negara Eropa memiliki akar yang kuat sejak Perang Dingin. Persenjataan politiknya semakin berkembang seiring munculnya perpecahan politik dan sosial yang semakin tajam di negara-negara tersebut, berkembangnya platform media sosial, perangkat kecerdasan buatan, serta semakin banyaknya aktor yang tidak memiliki etika dan hanya mengejar keuntungan. Perangkat ini telah menjadi bagian permanen dari lanskap pemilihan umum di seluruh Eropa—dan bukan hanya di Eropa—serta akan tetap demikian di masa depan. Disinformasi dan campur tangan dalam politik internal negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO hanyalah salah satu bagian dari perangkat yang dimiliki Rusia. Fasilitas transportasi udara dan darat, jaringan komunikasi, serta industri pertahanan Eropa yang terkait dengan perang di Ukraina telah menjadi sasaran yang terbuka bagi serangan fisik, siber, maupun drone Rusia. Perangkat tersebut juga mencakup gangguan terhadap bandara sipil dan sistem navigasi, ancaman terhadap pesawat penumpang dan pesawat kargo, serta upaya penculikan dan pembunuhan. Dari perspektif Kremlin, sebagaimana berulang kali dinyatakan oleh para pejabat senior Rusia, Eropa sedang berperang dengan Rusia. Kremlin tentu menggunakan karakterisasi tersebut untuk membantu membenarkan buruknya kinerja pasukannya hingga saat ini. Namun, kenyataannya adalah bahwa kekuatan-kekuatan Eropa terlibat secara mendalam dalam mempersenjatai Ukraina, berbagi intelijen, serta memberikan berbagai bentuk dukungan, meskipun tidak sampai terlibat secara langsung dalam perang. Meskipun sebagian besar dukungan tersebut diberikan oleh Washington, Kremlin melihat Eropa sebagai pihak yang sangat penting dalam memungkinkan Ukraina melanjutkan perang melawan Rusia, termasuk melalui serangan drone yang menargetkan kota-kota Rusia, infrastruktur energi, dan instalasi militer jauh di dalam wilayah Rusia. Dengan demikian, kampanye hibrida terhadap para pendukung Ukraina di Eropa semata-mata dipandang sebagai respons terhadap tindakan Eropa terhadap Rusia.

Epilog: Masa depan Eropa, Ancaman Nuklir, Menuju Era Pasca-Putin?

Perang Rusia–Ukraina tidak akan menghasilkan pemenang yang jelas. Tujuan Rusia untuk menghapuskan Ukraina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat justru semakin jauh setelah empat tahun perang dibandingkan dengan situasi pada Februari 2022. Harga yang harus dibayar Ukraina demi mempertahankan kelangsungan hidupnya akan terukir dalam ingatan kolektif bangsa tersebut sebagai sebuah tragedi yang sebanding dengan *“Holodomor”*, yaitu kelaparan yang diciptakan oleh rezim Soviet pada 1932–1933 dan menewaskan jutaan orang.

Geografi baru konfrontasi antara NATO dan Rusia merupakan sumber ketidakstabilan dan bahaya bagi kedua pihak. Rusia, setelah kehilangan kedalaman strategis yang dianggap penting bagi keamanannya, kini menghadapi berbagai sistem persenjataan NATO yang mampu mengancam sejumlah asetnya yang paling kritis.

Di sisi lain, NATO menghadapi Rusia yang tidak aman dan bermusuhan, dengan sebagian persenjataan canggihnya ditempatkan di Belarus dan eksklave Rusia Kaliningrad yang dikelilingi oleh anggota NATO, yaitu Lituania dan Polandia. Kedekatan geografis, ketidakpercayaan yang mendalam, dan kondisi geopolitik yang unik tersebut dapat menciptakan “perfect storm”, yaitu situasi ketika dalam suatu krisis kedua pihak terdorong untuk mengambil keuntungan sebagai pihak yang bergerak lebih dahulu karena khawatir bahwa menunggu atau menjadi pihak kedua akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima.

Penggunaan ancaman nuklir (“nuclear saber-rattling”) oleh Rusia selama perang di Ukraina juga menunjukkan bahwa senjata nuklir tetap merupakan instrumen pencegahan yang paling utama. Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden menetapkan garis merah untuk tidak menempatkan pasukan tempur Amerika Serikat di Ukraina, yang mengirimkan pesan kuat mengenai keengganan Amerika Serikat untuk terlibat dalam konflik langsung dengan negara berkekuatan nuklir. Jika terjadi perpecahan trans-Atlantik, Eropa akan kehilangan payung nuklir Amerika Serikat. Prancis dan Inggris tetap memiliki kekuatan nuklir nasional mereka, tetapi negara-negara Eropa lainnya dapat berada dalam posisi tidak menentu, tanpa pilihan yang jelas untuk mencegah Rusia menggunakan kekuatan nuklirnya yang sangat besar sebagai ancaman. Mengingat permusuhan Rusia terhadap negara-negara Eropa lainnya dan rekam jeaknya dalam melakukan pemerasan melalui ancaman nuklir, tidak ada tugas yang lebih sulit sekaligus lebih mendesak bagi negara-negara anggota NATO di Eropa selain merumuskan berbagai pilihan untuk menghadapi ancaman tersebut. Di mana pun dan kapan pun memungkinkan, Rusia akan menjalankan kebijakan—misalnya dengan memasok kemampuan dan teknologi militer canggih kepada China dan Korea Utara—yang bertujuan melemahkan Amerika Serikat, sekutu-sekutunya, dan kepentingan mereka. Bagaimanapun perkembangan hubungan Amerika Serikat–Eropa, pemahaman bersama dan upaya terkoordinasi untuk membatasi jangkauan global Rusia yang merugikan akan menjadi kepentingan Washington maupun Brussels.

Selama hampir seperempat abad era Putin, Rusia menunjukkan suatu lintasan yang sampai batas tertentu khas bagi banyak negara otoriter di seluruh dunia. Berkuasa setelah satu dekade resesi ekonomi dan kekacauan hukum serta politik yang besar, Putin pada awalnya mampu memulihkan ketertiban dan menghidupkan kembali perekonomian. Inilah sebabnya mengapa dua masa jabatan kepresidenan pertamanya pada tahun 2000-an dipuji oleh beberapa pengamat internasional, dan kecenderungan otoriter di Rusia secara luas dipandang sebagai suatu “gelombang balik” yang tidak terhindarkan namun sementara setelah periode demokratisasi yang tidak sempurna dan penuh gejolak pada tahun 1990-an. Namun, seiring berjalannya waktu, otoritarianisme yang berkembang secara perlahan menjadi hambatan besar bagi pembangunan sosial-ekonomi Rusia.

Konflik ini diselesaikan pada tahun 2010-an untuk kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa, yang bertujuan mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan masa depan negara dan bermaksud mempertahankan “stabilitas”, yang kemudian menjadikan stagnasi Rusia sebagai landasan utama tatanan politik dan ekonominya.

Pada tahun 2020-an, kesinambungan era Putin yang tidak berkesudahan menjadi tujuan utama para penguasa Rusia, terlepas dari hasil kebijakan dan kinerja negara. Apa yang berbeda di Rusia di bawah Putin tidak berkaitan dengan arena domestik, melainkan dengan arena internasional. Selama era Putin, Rusia menunjukkan ambisi internasional yang semakin meningkat, yang didorong oleh upaya untuk membalas kekalahan Rusia dalam Perang Dingin. Kebencian setelah keruntuhan Soviet (menurut Putin, “bencana geopolitik terbesar abad kedua puluh”) dan aspirasi para elite Rusia untuk memperoleh status yang tinggi mendapat sambutan dingin di Barat. Meskipun Rusia saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Uni Soviet dalam banyak hal, upaya memulihkan status sebagai kekuatan besar dan upaya untuk menjadi pemain veto internasional utama di berbagai belahan dunia mendorong Rusia menuju konfrontasi besar dengan AS, Uni Eropa, dan beberapa negara tetangganya pasca-Soviet, terutama setelah aneksasi Krimea pada tahun 2014.

Kesimpulan

Seorang penguasa yang menginginkan terlalu banyak kekuasaan, status, kekuatan, dan uang bagi dirinya sendiri serta lingkaran terdekatnya memberikan terlalu sedikit kepada negaranya dalam hal kemakmuran, kesetaraan, dan kebebasan. Era Putin, yang dimulai dengan potensi yang menjanjikan untuk menjadi kisah sukses besar bagi Rusia, berubah menjadi jalan besar menuju kekecewaan dan janji-janji yang tidak terpenuhi. Era pasca-Putin—kapan pun itu terjadi—tidak dapat dihindari harus menghadapi warisan domestik dan internasional yang sangat bermasalah yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Sulit untuk memprediksi kapan dan dengan cara apa era Putin akan berakhir, dan oleh karena itu hasilnya bagi Rusia dan bagi seluruh dunia hingga saat ini belum diketahui. Namun, dari perspektif awal tahun 2020-an, era Putin dapat dipandang sebagai masa peluang yang terlewatkan dan harapan yang pupus bagi Rusia. Semakin lama Putin tetap berkuasa, semakin suram warisan ini kemungkinan akan menjadi.

#) KGB (“Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti”) berarti Komite Keamanan Negara. KGB merupakan Badan Intelijen dan Keamanan Uni Soviet yang beroperasi dari 1954 hingga 1991. Perannya mencakup: Intelijen luar negeri — mengumpulkan informasi dari negara lain; Keamanan dalam negeri — menangani ancaman terhadap negara dan rezim Soviet; Kontraintelijen — mengawasi dan melawan kegiatan intelijen asing; Penegakan keamanan politik — mengawasi kelompok oposisi dan aktivitas yang

dianggap mengancam negara; Operasi intelijen dan pengaruh di luar negeri. Vladimir Putin bergabung dengan KGB pada 1975 dan bertugas sebagai perwira intelijen. Ia kemudian ditempatkan di Dresden, Jerman Timur, pada 1985–1990. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, KGB dibubarkan dan digantikan oleh beberapa Badan Keamanan dan intelijen Rusia.

- @) Putin terpilih kembali sebagai Presiden Rusia pada Pilpres 2024 dan akan menjabat untuk masa jabatan enam tahun ke depan hingga 2030, dengan potensi tambahan satu periode lagi, hingga 2036.

Jakarta, 27 Agustus 2026

Referensi:

1. Vladimir Putin and Russian Statecraft, Allen C. Lynch, Edited by Melvyn P. Leffer, University of Virginia, Potomac Book Inc, September 30, 2011
2. Mr. Putin: Operative in the Kremlin, Fiona Hill, Clifford G. Gaddy, Brookings Institute Press, 2013
3. Development in Russia Politics, Editor: Richard Sakwa, Henry E. Hale, Stephen White, Springer Nature Limited, 2019
4. The Putin Era from Routledge Handbook of Russian Politics and Society, Vladimir Gel'man, December 23, 2022
5. Putin's People: How KGB Took Back Russia and then Took on the West, Catherine Belton, Perlego Ltd, 2026
6. Biography of Vladimir Putin, President Executive Office, 2026
7. The Future of Russian Power, Belligerent and Beleaguered: Russia After the War with Ukraina, Eugene Rumer, Carnegie Endowment for International Peace, 2026

